

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP PERSEPSI
MASYARAKAT PADA AUTOPSI KORBAN TINDAK PIDANA DI
KECAMATAN PULAU PUNJUNG TAHUN 2017**



Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F
dr. Husna Yetti, Ph.D

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL AND PUBLIC PERCEPTION OF AUTOPSY ON CRIMINAL OFFENCE VICTIM IN SUBDISTRICT OF PULAU PUNJUNG IN 2017

By

Osalina Toemapa

ABSTRACT

Forensic science has an important role in criminal justice in Indonesia. In criminal offence case, investigator may request Visum Et Repertum to doctor that can be used as a valid evidence. In homicide, investigators may request for an autopsy to the victim without family aproval. Generally, there has been decreasing in autopsy rate in the world over the past years. Family's refusal is one of the most common problems. The purpose of this study is to find the correlation between knowledge level and public perception of autopsy on criminal offence victim.

This cross-sectional study was done from April 2017 to May 2017 in subdistrict of Pulau Punjung. Participants were asked to fill the questionnaire. There are 15 questions to assess knowledge level, perception and factors influencing autopsy refusal. The chi-square test was used for the statistical analyses.

Out of the total of 436 respondents, 54,5% were found to have poor knowledge level and 56,7% were found to have poor perception. There was a significant correlation between knowledge level and public perception ($p < 0,001$). There are 153 respondents who decline autopsy on criminal offence victim with the most factors influencing autopsy refusal is delays in victim's funeral (92,2 %).

Conclusion, knowledge level is correlated with public perception in subdistrict of Pulau Punjung, district of Dharmasray, West Sumatra. Most influencing factors in autopsy refusal is delays in victim's funeral

Keywords: knowledge level, public perception, autopsy on criminal offence victim

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT PADA AUTOPSI KORBAN TINDAK PIDANA DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG TAHUN 2017

Oleh

Osalina Toemapa

ABSTRAK

Ilmu kedokteran forensik berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Pada kasus tindak pidana, penyidik dapat mengajukan permintaan visum pada dokter untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah. Pada kasus pembunuhan, ketika penyidik menyatakan perlu, maka autopsi harus dilakukan pada korban dan tidak membutuhkan persetujuan keluarga. Secara umum, terdapat penurunan angka autopsi di dunia dari tahun ke tahun. Penolakan keluarga merupakan salah satu kendala yang paling banyak ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat pada autopsi korban tindak pidana.

Studi *cross-sectional* ini dilakukan mulai April 2017 sampai May 2017 di Kecamatan Pulau Punjung. Subjek penelitian diminta untuk mengisi kuesioner. Terdapat 15 pertanyaan untuk menilai tingkat pengetahuan, persepsi dan faktor yang mempengaruhi penolakan autopsi. Uji chi-square digunakan untuk analisis statistik.

Dari 436 responden, 67,2 % memiliki tingkat pengetahuan buruk dan 56,7 % memiliki persepsi buruk. Didapatkan hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat ($p<0,001$). Terdapat 153 responden yang menolak autopsi pada korban tindak pidana dengan faktor yang mempengaruhi penolakan terbanyak yaitu penundaan pemakaman (92,2 %).

Kesimpulan, didapatkan hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan persepsi masyarakat Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Faktor yang mempengaruhi penolakan terbanyak adalah penundaan pemakaman korban.

Kata kunci: tingkat pengetahuan, persepsi masyarakat, autopsi korban tindak pidana